



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

NOMOR : 10 TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) PROVINSI RIAU
TAHUN 2009 - 2013**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2009**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2013	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Landasan Hukum	I - 2
D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..	I - 4
E. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
A. Kondisi Geografis	II - 1
B. Perekonomian Daerah	II - 7
C. Sosial Budaya Daerah	II -23
D. Prasarana dan Sarana Daerah	II -33
E. Pemerintahan Umum	II -38
F. Tata Ruang	II -40
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	III - 1
A. Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau	III - 1
B. Kerangka Pendanaan Provinsi Riau	III - 4
BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS	IV - 1
A. Analisa Lingkungan Internal	IV - 1
B. Analisa Lingkungan Eksternal	IV-10
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU	V - 1
A. Visi Pembangunan Provinsi Riau	V - 1
B. Misi Pembangunan Provinsi Riau	V - 2
C. Tujuan Pembangunan Provinsi Riau 2009-2013	V - 3
D. Sasaran Pembangunan Provinsi Riau	V - 4
1. Rencana Makro Ekonomi Tahun 2009-2013	V - 4
2. Rencana Investasi Riau Tahun 2009-2013	V - 8
3. Rencana Distribusi Pendapatan Tahun 2009-2013	V-12
4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Tahun 2009-2013	V-17

BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU	VI - 1
	A. Strategi Pembangunan Provinsi Riau	VI - 1
	B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau	VI - 2
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU	VII - 1
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
	A. Indikasi Rencana Program Prioritas	VIII - 1
	B. Kebutuhan Dana Pembangunan Tahun 2009-2013	VIII - 7
	C. Rencana Kerangka Regulasi	VIII - 8
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX - 1
BAB X	PENUTUP	X - 1
	A. Program Transisi	X - 1
	B. Kaidah Pelaksanaan	X - 2

***** (2009) *****

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran I.5

Bagan 1.2. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 .. I.8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Arahkan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau Diaktualisasikan Dalam RPJMD 2009-2013 V - 20

Gambar 5.2. Arahkan Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Provinsi Riau Diaktualisasikan Dalam RPJMD 2009-2013 V - 23

Gambar 5.3. Arahkan Sistem Penyediaan Energi Listrik Wilayah Provinsi Riau Diaktualisasikan Dalam RPJMD 2009-2013 V - 26

Gambar 5.4. Arahkan Sistem Penyediaan Air Bersih Wilayah Riau Diaktualisasikan Dalam RPJMD 2009-2013 V - 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Milyar Rupiah) Tahun 2004 - 2008	II - 8
Tabel 2.2.	Distribusi PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Persen) Tahun 2004 - 2008	II - 9
Tabel 2.3.	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas (Milyar Rupiah) Tahun 2004 - 2008	II - 10
Tabel 2.4.	Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas (Persen) Tahun 2004 - 2008	II - 11
Tabel 2.5.	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Termasuk Migas Tahun 2004 - 2008 (Milyar Rupiah)	II - 13
Tabel 2.6.	Distribusi PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Termasuk Migas (Persen) Tahun 2004 - 2008	II - 14
Tabel 2.7.	PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Termasuk Migas (Milyar Rupiah) Tahun 2004 - 2008	II - 15
Tabel 2.8.	Pertumbuhan PDRB dan Sektor Provinsi Riau Termasuk Migas (Persen) Tahun 2004 - 2008	II - 16
Tabel 2.9.	Jumlah Ekspor dan Impor melalui Provinsi Riau (US \$) Tahun 2004 - 2008	II - 17
Tabel 2.10.	Jumlah Investasi Provinsi Riau (Milyar Rupiah) Th 2004 - 2008...	II - 18
Tabel 2.11.	Pola Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Provinsi Riau (Persen) Tahun 2003 - 2007	II - 26
Tabel 2.12.	Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka (Orang) Provinsi Riau Tahun 2004 - 2007	II - 27
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2007	II - 30
Tabel 2.14.	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2009	II - 39
Tabel 3.1.	Jumlah Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau (Miliar Rp) Tahun 2004 - 2008	III - 2

Tabel 3.2.	Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Riau Tahun 2004-2008	III - 3
Tabel 3.3.	Penempatan Kerangka Pendanaan Menurut Urusan Wajib dan Pilihan SKPD Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2004-2008	III - 7
Tabel 5.1.	Rencana Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp) Tahun 2009-2013	V - 5
Tabel 5.2.	Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Persen) Provinsi Riau Tahun 2009-2013	V - 6
Tabel 5.3.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp) Tahun 2009-2013	V - 7
Tabel 5.4.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas (Persen) Provinsi Riau Tahun 2009-2013	V - 8
Tabel 5.5.	Perkiraan Investasi Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp) Tahun 2009-2013	V - 9
Tabel 5.6.	Perkiraan Pendapatan Provinsi Riau (Milyar Rp) Th 2009 -2013 ..	V - 11
Tabel 5.7.	Sasaran Distribusi Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013.	V - 12
Tabel 5.8.	Sasaran Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Termasuk Migas (%) Provinsi Riau Tahun 2007 – 2009	V - 13
Tabel 5.9.	Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau (Orang/ Jiwa) Tahun 2009-2013	V - 16
Tabel 5.10	Rincian Tingkat Pengangguran Provinsi Riau Tahun 2009-2013 ..	V - 17
Tabel 6.1.	Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Dengan Pendekatan SWOT	VI - 1
Tabel 7.1.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2009-2013	VII - 1
Tabel 8.1.	Indikator Rencana Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau RPJMD Pada Tahun Terakhir 2013	VIII – 1
Tabel 8.2.	Rencana Kebutuhan Dana Pembangunan Provinsi Riau (Milyar Rupiah) Tahun Anggaran 2013	VIII – 7

Tabel 8.3.	Rencana Kerja Kerangka Pendanaan (Milyar Rupiah) Tahun 2009-2013	VIII - 8
Tabel 9.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 2
Tabel 9.2.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 2
Tabel 9.3.	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 3
Tabel 9.4.	Proyeksi Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 3
Tabel 9.5.	Proyeksi Angka Kematian Bayi di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 4
Tabel 9.6.	Proyeksi Angka Harapan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dan Tahun 2014 (masa transisi)	IX - 4
Tabel 9.7	Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2009-2013	IX - 5



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Riau;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko;
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan kemajuan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Renstra SKPD;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 merupakan:

- a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran Provinsi Riau;
- b. Penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se Riau;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

BAB IV RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJMD Provinsi Riau memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi Gubernur mencakup kebijakan pengelolaan Keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja;
- (2) RPJMD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Gubernur pada akhir masa jabatan.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Dokumen yang disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan RPJMD Provinsi Riau tahun 2009 - 2013.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan sarana daerah, pemerintahan daerah serta tata ruang.

c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran pengelolaan keuangan Provinsi Riau dan kerangka pendanaan Provinsi Riau.

d. BAB IV : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Memuat analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal.

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau untuk lima tahun ke depan (2009 - 2013).

f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Memuat strategi pembangunan dan arah kebijakan prioritas yang menjadi landasan pembangunan Provinsi Riau tahun 2009 - 2013.

g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

Memuat kebijakan umum dan program pembangunan Provinsi Riau tahun 2009 - 2013.

h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat indikasi rencana program prioritas yang ditampilkan tahun terakhir RPJMD Provinsi Riau (2013), rencana kebutuhan dana tahun 2009 - 2013 dan rencana kerangka regulasi.

i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang diukur dari aplikasi kebijakan umum pembangunan dan program pembangunan Provinsi Riau tahun 2009 - 2013 yang ditampilkan tahun terakhir RPJMD Provinsi Riau (2013) dari SKPD pelaksana.

j. BAB X : P E N U T U P

Menjelaskan program transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 6

RPJMD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan suatu dokumen resmi sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Oktober 2009

 **GUBERNUR RIAU,**

 **H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan : di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Oktober 2009

 **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

 **H. WAN SYAMSIR YUS**
Pembina Utama Madya
NIP.19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2009 - 2013. RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Riau dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025, dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau tahun 2005 - 2025.

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum yang akuntabel, kehidupan yang lebih maju dan sejahtera untuk kurun lima tahun ke depan (2009 - 2013) dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Untuk hal dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 -2013.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 7 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 RIAU NOMOR 10

BAB I

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yakni untuk tahun 2009 sampai dengan 2013. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau periode sebelumnya.

Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Proses penyusunan RPJMD Provinsi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Riau sebagai rencana kebijakan pembangunan Provinsi Riau dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Provinsi Riau, wilayah sekitar, nasional, maupun internasional. Diketahui bahwa perkembangan pada lingkup nasional telah berlangsung perubahan sistem perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan posisi dan substansi masing-masing dengan harapan instrumen tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH****A. Kondisi Geografis**

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" - 105°05'00" Bujur Timur. Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 km², dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan sisanya adalah lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologi daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.l. dan bagian tengah merupakan dataran bergelombang serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur.

Provinsi Riau memiliki 4 (empat) sungai besar diantaranya berperan penting sebagai prasarana perhubungan, yakni Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ± 400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6-8 meter. Wilayah Riau bagian timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan air sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala. Pada tahun 2004 dan 2006, terdapat indikasi bahwa wilayah yang mengalami bencana banjir dan genangan air menjadi semakin luas akibat luapan Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri/Batang Kuantan, yakni di delapan kabupaten dan kota. Tercatat tinggi genangan berada pada kisaran 1- 2,5 meter.

Sebagai akibat dilaluinya dan menjadi muara dari sejumlah sungai besar tersebut serta kondisi tekstur lahan yang cenderung datar, maka sebagian wilayah di Provinsi Riau berpotensi terjadinya banjir dan genangan air disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu sungai yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat, dan di sepanjang DAS; surplus neraca air pada bulan-bulan basah; pertemuan beberapa anak sungai di bagian

hulu; pengaruh pasang-surut; keberadaan rawa gambut di wilayah tengah dan hilir yang menjadi kendala aliran permukaan; alih fungsi lahan hutan pada DAS dan sub-DAS; pemanfaatan tepi sungai untuk kegiatan bongkar-muat yang menyebabkan abrasi dan pengikisan tebing sungai; serta tumbuhnya gulma air pada badan air sungai yang menghambat aliran sungai.

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Di kawasan timur Provinsi Riau sebagian besar merupakan lahan gambut yang terbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.

Provinsi Riau memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariasi berupa kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara lima belas sungai yang mengalir ke pantai timur, maka kawasan pesisir dan laut kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ternyata merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar masyarakat ekonomi lemah. Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.

Dari seluruh hamparan hutan yang ada di Provinsi Riau, luas kawasan hutan lindung tinggal sekitar 228.793,82 Ha atau 2,66% dari luas kawasan hutan yang ada. Tingginya alih fungsi lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Pembukaan hutan untuk fungsi lainnya yang beragam, berlangsung secara berangsur-angsur dan tercatat seluas 72.299 Ha pada tahun 2004. Provinsi Riau memiliki kawasan budidaya pertanian seluas 2.843.471 ha pada tahun 2008. .Alih fungsi tersebut dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perkayuan, permukiman, perladangan, dan perambahan hutan. Umumnya alih fungsi lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang semuanya perlu mengindahkan konsep konservasi.

Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir karena berkurangnya daerah resapan air serta perubahan lahan pertanian di daerah tangkapan air. Hal tersebut juga menimbulkan kerusakan badan sungai berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar-muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan dengan semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan dengan meningkatnya luas lahan tidur dan terbentuknya padang rumput. Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan DAS Indragiri – Rokan, menunjukkan bahwa hutan tanaman industri (HTI), dan pertanian lahan kering dalam kawasan DAS Siak semakin luas, sehingga secara bertahap mengurangi luasan hutan sebagai resapan dan reservoir air.

Keberadaan lahan terlantar telah menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Provinsi Riau. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan kembali melalui program lestari.

Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit, *crumb rubber*, *plywood*, *pulp* dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Indikasi penurunan kualitas air sungai oleh sumber-sumber domestik dan industri antara lain ditunjukkan oleh pencemaran sungai, dimana konsentrasi parameter pencemar telah melampaui baku mutu serta beban limbah yang besar yang dibuang oleh industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan ke sungai Siak. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK dan kota-kota yang berlokasi di bagian tengah DAS menggunakan sebagai air baku penyediaan air bersih.

Kerusakan fisik badan sungai yang ditandai oleh tingginya sedimentasi dan konsentrasi tingkat solid yang tersuspensi (TSS) dan tingkat solid yang terlarutkan (TDS) oleh abrasi dan longsor tebing sungai yang disebabkan alih fungsi lahan dalam DAS maupun kegiatan bongkar-muat bahan baku dan produk industri di tepi sungai telah mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan transportasi sungai yang menjadi salah satu moda transportasi penting di Provinsi Riau.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Provinsi Riau sejak beberapa tahun terakhir berlangsung secara berkala adalah perubahan iklim yang tidak menentu dan cenderung meningkatkan suhu bumi. Hal tersebut juga disebabkan dari kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Provinsi Riau, bahkan negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan pola pembersihan lahan oleh perusahaan tertentu untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal.

Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Provinsi Riau. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Optimalisasi tata guna lahan dan tata air diupayakan melalui penyiapan rencana pengelolaan DAS terpadu; penataan permukiman di tepian sungai melalui konsep *river front development*; penataan lokasi pertambangan, industri, dan fasilitas umum; pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; legalisasi dan sosialisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; reboisasi dan penghijauan; penertiban lokasi *log pond*; pengendalian kegiatan perladangan berpindah, perambahan hutan, dan *illegal logging*; pengendalian kebakaran hutan; pembangunan kanal dan prasarana penanggulangan banjir; pelaksanaan pengawasan kawasan perlindungan tata air dan penyediaan prasarana pengamatan tata air; dan pengendalian pemanfaatan air tanah.

Pengendalian pencemaran terhadap badan air diupayakan melalui penataan lokasi sumber-sumber pencemar; pengendalian limbah B3; pelaksanaan program *land application* untuk industri kelapa sawit; pengendalian limbah domestik dan industri melalui pembangunan IPAL, Sistem Informasi Lingkungan (SIL) untuk pengendalian pencemaran sungai, pesisir, dan laut.

Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan telah diupayakan melalui pemadaman kebakaran, pembentukan Posko Siaga kebakaran hutan, pengaturan melalui keputusan Gubernur Riau, membangun sistem informasi kebakaran hutan, penegakkan hukum terhadap pembakar lahan secara ilegal, dan membangun kerjasama internasional melalui pembentukan pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada skala ASEAN.

Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun lingkungan yang lestari diupayakan melalui penegakan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan; sosialisasi peraturan-perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; sosialisasi program SUPER bagi industri; penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan; dan implementasi Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL; pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; pembentukan forum dan gerakan masyarakat peduli lingkungan; penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (*Proper*); pelaksanaan program Adipraja dan Laut Lestari; pengendalian dan penanganan limbah UKM dan rumah tangga dan pengembangan program kemitraan dalam pemanfaatan dan daur-ulang limbah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup diupayakan melalui penataan dan pengaturan peruntukan sungai; penetapan baku mutu kualitas lingkungan; penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan berfungsi lindung; pengembangan sarana laboratorium pengujian kualitas lingkungan; pelaksanaan program Bangun Praja; pembinaan PPNS dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; serta peningkatan peran serta institusi bidang lingkungan hidup daerah dalam perencanaan penataan ruang dan pembangunan daerah.

Lingkungan hidup yang lestari telah menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh, termasuk yang dilaksanakan oleh Provinsi Riau. Untuk itu, perlu diperkuat kesiapan Provinsi Riau dalam menghadapi perkembangan global di bidang lingkungan hidup yang antara lain terwujud sebagai *trade barrier*, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan sebagainya.

Di samping itu, sebagai daerah yang berdekatan dengan negara lain, juga dituntut kesiapan Provinsi Riau dalam pengendalian kerusakan lingkungan yang berpotensi mengganggu hubungan antar negara, seperti pengendalian kebakaran hutan. Provinsi Riau juga dituntut berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan wilayahnya yang memiliki hutan yang luas, perkembangan kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan pencemar gas rumah kaca, dan peningkatan suhu bumi. Dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut yang mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perubahan pola iklim yang memberikan dampak secara langsung terhadap aktivitas masyarakat di Provinsi Riau. Pada skala nasional Provinsi Riau juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat mencapai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program nasional, seperti Bangun Praja, Laut Lestari, dan sebagainya.

Pembangunan dan penguatan kelembagaan dan aparatur yang membidangi lingkungan hidup; pengembangan pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan;

Secara prinsip seluruh sektor dan subsektor mengalami kenaikan secara nominalnya, namun dari 9 sektor tersebut kenaikan yang terendah pada tahun 2008 jika dibandingkan dengan tahun 2004, adalah sektor listrik dan air minum (kurang dari 100%), sedangkan yang terbesar secara nominal dialami oleh sektor pertanian, yakni sebesar Rp 29.245,99 milyar.

Tabel 2.1

PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas (Milyar Rupiah)
Tahun 2004 - 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	23.656,40	30.171,56	36.294,16	43.595,54	52.902,39
	- Tanaman pangan	2.076,35	2.178,66	2.258,48	2.513,18	2.734,34
	- Perkebunan	11.096,20	14.941,13	18.483,89	22.683,71	28.779,35
	- Peternakan	766,77	874,54	1.013,48	1.148,71	1.312,63
	- Kehutanan	7.358,99	9.397,58	11.279,16	13.426,18	15.776,94
	- Perikanan	2.358,09	2.779,65	3.259,15	3.823,76	4.299,13
		464,57	668,15	1.248,68	2.013,00	2.516,25
2.	PERTAMBANGAN	21.085,73	25.186,93	29.239,52	35.297,76	42.712,34
3.	INDUSTRI & PENGOLAHAN	264,64	303,32	339,75	397,92	444,71
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	3.150,74	3.467,55	4.258,80	7.045,51	7.851,15
5.	BANGUNAN	7.403,06	9.124,85	11.179,72	14.067,61	17.491,99
6.	PERDAGANGAN	2.296,93	2.694,57	3.216,18	3.850,45	4.585,27
7.	PENGANGKUTAN	1.982,73	2.569,16	3.134,17	3.920,67	4.704,80
8.	KEUANGAN DAN BANK	4.223,02	4.879,20	5.904,57	6.808,25	7.999,69
9.	JASA					
	PDRB	64.223,02	79.065,29	94.815,55	117.046,71	142.208,50

Sumber : BPS Provinsi Riau 2008

Apabila dari sisi distribusi persentase, maka perekonomian Provinsi Riau selama periode tahun 2004 – 2008 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi oleh sektor pertanian dan cenderung meningkat setiap tahunnya dari 36,66% (Tahun 2004) menjadi 37,19% (Tahun 2008). Kenaikan ini disebabkan oleh karena kenaikan PDRB yang berasal dari perkebunan, dari 17,20% naik menjadi 20,24% pada periode yang sama. Selain pertanian, sesuai dengan letak Provinsi Riau yang sangat strategis, maka peran sektor Industri relatif besar, yakni diatas 30%, walau perannya semakin menurun dari tahun 2004 sebesar 34,68% menjadi 30,03% pada tahun 2008.

Penurunan kontribusi sektor Industri dalam perekonomian Provinsi Riau, disebabkan oleh karena adanya peningkatan PDRB menurut harga berlaku pada sektor, seperti sektor pertanian, perdagangan dari 11,47% pada tahun 2004 naik

menjadi 12,30% pada tahun 2008, sektor pertambangan dari 0,72% tahun 2004 menjadi 1,77% tahun 2008, sektor uang dan bank naik dari 3,07% tahun 2004 menjadi 3,31% tahun 2008. Penurunan distribusi prosentase selama 5 tahun yang lalu ini bukan hanya dialami oleh sektor industri saja, tetapi juga 4 sektor lainnya yang kurang dominan, yakni sektor Listrik dan Air Minum, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan, dan sektor Jasa. Sedangkan sektor Perdagangan mengalami kenaikan yang relatif tinggi yakni dari 11,47% pada tahun 2004 menjadi 12,30% pada tahun 2008.

Tabel 2.2 :

Distribusi PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas
Tahun 2004 - 2008 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	36,66	38,18	38,29	37,25	37,19
	- Tanaman pangan	3,22	2,76	2,38	2,15	1,92
	- Perkebunan	17,20	18,90	19,50	19,38	20,24
	- Peternakan	1,19	1,11	1,07	0,98	0,92
	- Kehutanan	11,40	11,89	11,90	11,47	11,09
	- Perikanan	3,65	3,52	3,44	3,27	3,02
2.	PERTAMBANGAN	0,72	0,85	1,32	1,72	1,77
3.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	32,68	31,86	30,84	30,16	30,03
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,41	0,38	0,36	0,34	0,31
5.	BANGUNAN	4,88	4,39	4,49	6,02	5,52
6.	PERDAGANGAN	11,47	11,54	11,79	12,02	12,30
7.	PENGANGKUTAN	3,56	3,41	3,39	3,24	3,22
8.	KEUANGAN DAN BANK	3,07	3,25	3,31	3,35	3,31
9.	JASA	6,55	6,14	6,21	5,85	6,35
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Riau PDRB Provinsi Riau 2004-2007, Proyeksi 2008.

Pada bagian lain diperhatikan bahwa pada tahun 2004 PDRB Atas Harga Konstan Tanpa Migas tercatat sebesar Rp 30.879,70 milyar, tahun 2005 sebesar Rp 33.516,48 milyar, tahun 2006 sebesar Rp 36.417,57 milyar, tahun 2007 sebesar Rp 39.391,53 milyar dan tahun 2008 sebesar Rp 42.833,46 milyar, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2008 turun dari sebelumnya 8,25% menjadi 8,06%. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis keuangan global yang mulai terjadi tahun 2007 akhir. Pertumbuhan tersebut juga dapat memperluas lapangan kerja rata-rata sebesar 4,71% setahun pada tahun 2007. Untuk sektor pertanian, pertumbuhan rata-rata tahun 2004 – 2008 sebesar 7,04%, yang disumbangkan

dari sub sektor tanaman pangan 3,09%, sub sektor perkebunan 8,86% dimana pembangunan perkebunan telah meningkatkan pendapatan asli daerah Riau dan telah mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti perdagangan, industri, jasa, investasi, dan membuka kesempatan kerja, sub sektor peternakan 6,67%; sub sektor kehutanan 6,40%; sub sektor perikanan 8,06%. Sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami pasang surut pertumbuhannya, dimana pada tahun 2004 sebesar 34,07% dan pada tahun 2008 tinggal lagi 4,64% dengan rata-rata sebesar 20,99%; sektor industri pengolahan 9,57%; sektor listrik air minum 9,19%; bangunan 8,33%; perdagangan 8,49%; pengangkutan 10,77%; keuangan dan bank 17,01%; sektor Jasa 9,24%.

Tabel 2.3

PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
(Milyar Rupiah) Tahun 2004 – 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	12.464,86	13.308,64	14.103,02	15.149,01	16.372,51
	- Tanaman pangan	1.649,39	1.689,45	1.724,88	1.783,42	1.856,69
	- Perkebunan	4.369,77	4.792,83	5.252,09	5.705,45	6.231,83
	- Peternakan	609,78	653,52	699,64	745,78	800,91
	- Kehutanan	4.679,81	4.920,27	5.074,52	5.454,16	5.895,81
	- Perikanan	1.156,11	1.252,57	1.351,89	1.460,20	1.587,27
2.	PERTAMBANGAN	316,52	402,75	517,98	623,54	652,50
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	5.230,45	5.705,20	6.224,83	6.810,48	7.497,81
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	151,55	165,49	175,20	192,49	212,81
5.	BANGUNAN	2.064,97	2.212,67	2.395,73	2.592,50	2.823,32
6.	PERDAGANGAN	5.121,97	5.641,81	6.278,66	6.621,66	7.030,44
7.	PENGANGKUTAN	1.794,89	1.982,65	2.173,44	2.404,04	2.675,48
8.	KEUANGAN & BANK	653,13	771,84	892,82	1.029,50	1.193,76
9.	JASA	3.081,36	3.325,43	3.655,89	3.968,31	4.374,83
PDRB		30.879,70	33.516,48	36.417,57	39.391,53	42.833,46

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2003-2006, dan Angka Proyeksi Tahun 2008

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,50% per tahun selama periode tahun 2004 – 2008 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan berfluktuasi. LPE Provinsi Riau tanpa migas ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2004 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 9,01%, tahun 2005 sebesar 8,54%, tahun 2006 sebesar 8,66%; tahun 2007 sebesar 8,17%, dan tahun 2008 sebesar 8,06%. LPE Nasional mencatat 5,99% pada tahun 2004, 6,57% pada tahun 2005; 6,09% pada tahun 2006; 6,30% pada tahun 2007; dan 6,20% pada tahun

2008. LPE Provinsi Riau mengalami fluktuasi karena tergantung pada kondisi ekonomi pada tahun yang bersangkutan dan juga menyangkut kebijakan Nasional pada umumnya dan terakhir sejak tahun 2007 juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang sedang krisis.

Tabel 2.4

Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas (Persen) Tahun 2004 - 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	7,00	6,77	5,97	7,42	8,07
	- Tanaman pangan	3,44	2,43	2,10	3,39	4,11
	- Perkebunan	7,25	9,68	9,50	8,63	9,23
	- Peternakan	5,05	7,17	7,06	6,59	7,39
	- Kehutanan	8,26	5,14	3,13	7,40	8,09
	- Perikanan	7,33	8,34	7,93	8,01	8,70
2.	PERTAMBANGAN	34,07	27,24	28,61	10,38	4,64
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	10,14	9,08	9,11	9,41	10,09
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	10,44	9,20	5,87	9,87	10,56
5.	BANGUNAN	9,10	7,15	8,27	8,21	8,9
6.	PERDAGANGAN	9,37	10,15	11,29	5,46	6,17
7.	PENGANGKUTAN	11,85	10,46	9,62	10,61	11,29
8.	KEUANGAN DAN BANK	18,92	18,18	15,67	15,31	15,95
9.	JASA	9,06	7,91	9,94	8,55	10,24
PDRB		9,01	8,54	8,66	8,17	8,06

Sumber : Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2002-2006, Bappeda Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau 2008.

2. Perekonomian dengan Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku serta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Bila melihat kondisi kondisi perekonomian Provinsi Riau dengan memasukan peranan minyak dan gas bumi, kelihatannya Provinsi Riau adalah provinsi yang relatif kaya dan makmur, namun hal tersebut sangat berbeda dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dimana oleh karena perolehan dari minyak dan gas bumi tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh Provinsi Riau (hanya 15% berdasarkan *lifting* yang ditetapkan dengan tidak transparan oleh pemerintah pusat). Sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan, mutu sumberdaya manusia yang masih rendah, berdaya

saing rendah dan tidak memadai karena tingkat pendidikan yang relatif rendah; kualitas kesehatan yang masih harus dibenahi karena masih terdapatnya penderita gizi buruk dan pelayanan kesehatan yang belum merata; masih adanya kelompok masyarakat yang kurang tersentuh oleh pembangunan (masyarakat Komunitas Adat Terpencil); masih banyaknya desa-desa yang terisolir sebagai akibat dari lemahnya infrastruktur; tingkat pengangguran yang relatif tinggi sebagai akibat tingginya tingkat migrasi penduduk; dan ketimpangan hasil-hasil pembangunan antara kabupaten/kota. Kondisi ini akan terungkap apabila dalam analisa makro dimasukkan peranan minyak dan gas bumi.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 berjumlah Rp 114.246,31 milyar. Dari jumlah ini ternyata sumbangan minyak dan gas bumi sebesar Rp 47.475,69 milyar yang terdiri dari minyak dan gas bumi Rp 47.011,12 milyar dan industri migas sebesar Rp 2.707,37 milyar. Padahal kalau peranan minyak dan gas bumi dikeluarkan, maka hasil pertambangan hanya sebesar Rp 464,57 milyar dan industri non migas sebesar Rp 21.085,73 milyar.

Sektor lain yang juga besar peranannya adalah sektor pertanian sebesar Rp 19.431,31 milyar yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan Rp 1.830,26 milyar, perkebunan Rp 8.751,03 milyar, peternakan Rp 673,63 milyar, kehutanan Rp 6.246,22 milyar dan perikanan Rp 1.930,17 milyar. Dari sektor pertanian ada dua subsektor yang cukup besar peranannya yaitu perkebunan dan kehutanan yang kenyataannya kedua subsektor tersebut sebagian besar diusahakan oleh pengusaha besar, sedangkan subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan sebagian besar diusahakan oleh masyarakat kecil khususnya di daerah pedesaan.

Disamping itu masih ada dua sektor lagi yang ada pada umumnya masih dikuasai oleh masyarakat, yaitu sektor pengangkutan dan sebagian besar sektor perdagangan. Jumlah sumbangan sektor pengangkutan sebesar Rp 1.913,87 milyar dan sektor perdagangan Rp 5.782,99 milyar. Sedangkan sektor-sektor lain seperti listrik, air minum, bangunan, keuangan dan bank serta sektor jasa jumlahnya tidak lebih dari Rp 7.890,64 milyar.

Keadaan ini hampir tidak berubah pada tahun 2008, jumlah Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 252.516,42 milyar, dimana peranan minyak dan gas bumi pada sektor pertambangan menjadi Rp 107.055,99 milyar dan industri migas pada sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 4.018,86 milyar. Untuk jumlah PDRB subsektor industri Migas ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PDRB subsektor Industri Non Migas yang mencapai sebesar Rp 43.169,33 milyar, hal ini menandakan bahwa perkembangan sektor industri di Provinsi Riau sampai tahun 2008 sangat

dipengaruhi oleh industri non migas, terutama industri agro yang bahan bakunya berasal dari sektor pertanian.

Tabel 2.5 :
PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Termasuk Migas
Tahun 2004 - 2008 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	23.656,40	30.171,56	36.294,16	43.596,54	52.902,39
	- Tanaman pangan	2.076,35	2.178,66	2.258,48	2.513,18	2.734,34
	- Perkebunan	11.096,20	14.941,13	18.483,89	22.683,71	28.779,35
	- Peternakan	766,77	874,54	1.013,48	1.148,71	1.312,63
	- Kehutanan	7.358,99	9.397,58	11.279,16	13.427,18	15.776,94
	- Perikanan	2.358,09	2.779,65	3.259,15	3.823,76	4.299,13
2.	PERTAMBANGAN	47.475,69	57.927,69	70.427,51	91.120,13	109.348,23
	- Minyak dan gas	47.011,12	57.259,54	69.178,83	89.315,21	107.055,99
	- Tanpa migas	153,23	310,35	800,05	1.226,24	1.594,11
	- Penggalian	311,34	357,80	448,63	578,66	700,13
3.	INDUSTRI & PENGOLAHAN	23.793,10	27.881,00	32.313,27	39.165,49	47.188,19
	- Industri migas	2.707,37	2.694,07	3.073,75	3.564,56	4.018,86
	- Industri Non migas	21.085,73	25.186,93	29.239,52	35.600,93	43.169,33
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	264,64	203,32	339,75	399,00	444,71
5.	BANGUNAN	3.150,74	3.467,55	4.258,80	7.035,09	7.851,15
6.	PERDAGANGAN	7.403,06	9.124,85	11.179,72	14.070,17	17.491,99
7.	PENGANGKUTAN	2.296,93	2.694,57	3.216,18	3.843,05	4.585,27
8.	KEUANGAN DAN BANK	1.982,73	2.569,16	3.134,17	3.927,05	4.704,80
9.	JASA	4.223,02	4.879,20	5.904,57	6.846,08	7.999,69
PDRB		114.246,31	139.018,90	167.068,13	210.002,60	252.516,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2008

Dilihat dari sisi distribusinya, maka peran minyak dan gas bumi sangat besar, yakni mencapai 42,39% sedangkan dari subsektor industri minyak dan gas bumi hanya sekitar 1,59%. Hal ini menandakan bahwa dari aspek penambangan yang menghasilkan bahan mentah berupa minyak mentah (*crude oil*) sangat dominan yang hasilnya sebagian besar di ekspor, sementara yang diolah di dalam Provinsi Riau melalui kilang-kilang pengolahan yang ada di Dumai dan Sungai Pakning sangat kecil sekali. Dengan demikian sesungguhnya nilai tambah yang diperoleh bagi daerah menjadi kecil. Hal ini seperti yang terjadi pada subsektor agro industri, dimana sekalipun cukup besar distribusi persentasenya karena cukup banyak industri-industri hulu yang berkembang, sementara itu industri hilirnya relatif sedikit yang berkembang terutama yang bahan bakunya berasal dari minyak kelapa sawit (CPO), sehingga sebagian besar CPO yang dihasilkan di Riau lebih banyak di ekspor ke luar negeri.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Termasuk Migas
(Persen) Tahun 2004 - 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	20,70	21,71	21,72	20,76	20,95
	- Tanaman pangan	1,82	1,57	1,35	1,20	1,08
	- Perkebunan	9,71	10,75	11,06	10,80	11,40
	- Peternakan	0,67	0,63	0,61	0,55	0,52
	- Kehutanan	6,44	6,76	6,75	6,39	6,25
	- Perikanan	2,06	2,00	1,95	1,82	1,70
2.	PERTAMBANGAN	41,55	41,67	42,16	43,99	43,30
	- Minyak dan gas	41,15	41,19	41,41	42,53	42,39
	- Tanpa migas	0,13	0,22	0,48	0,58	0,63
	- Penggalian	0,27	0,26	0,27	0,28	0,28
3.	INDUSTRI & PENGOLAHAN	20,83	20,06	19,35	18,65	18,69
	- Industri migas	2,37	1,94	1,84	1,70	1,59
	- Industri Non migas	18,46	18,12	17,50	16,95	17,10
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	0,23	0,22	0,20	0,10	0,18
5.	BANGUNAN	2,76	2,49	2,55	3,35	3,11
6.	PERDAGANGAN	6,48	6,56	6,69	6,70	6,93
7.	PENGANGKUTAN	2,01	1,94	1,93	1,83	1,82
8.	KEUANGAN DAN BANK	1,74	1,85	1,88	1,87	1,86
9.	JASA	3,70	3,50	3,53	2,66	3,16
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Tahun 2004 – 2007 PDRB Provinsi Riau, BPS Provinsi Riau; 2008 Angka Proyeksi

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan ini adalah dimaksudkan untuk melihat secara nyata kondisi perekonomian suatu daerah, apakah ada peningkatan ataupun pertumbuhan dari sisi produksi ataupun tidak, dengan menghilangkan faktor inflasi dan penyusutan. Dengan demikian, maka nilai yang diperoleh pada PDRB berdasarkan harga konstan dibandingkan dengan harga berlaku cukup besar perbedaannya. Perhitungan harga konstan ini menggunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar, yakni tahun 2000.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000 termasuk minyak bumi, maka jumlah PDRB Provinsi Riau pada tahun 2004 sebesar Rp 75.216,36 milyar dan pada tahun 2008 naik menjadi Rp 92.237,26 milyar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh karena seluruh sektor mengalami kenaikan PDRBnya, walau dengan tingkat kenaikan yang cukup beragam sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan nasional maupun regional yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Riau.

Secara nominal, pertambahan PDRB yang paling tinggi dialami oleh sektor pertambangan dari sebesar Rp 42.334,54 milyar pada tahun 2004 naik

sebesar Rp 5.026,50 milyar atau menjadi Rp 47.361,04 milyar pada tahun 2008, kenaikan tersebut terbesar berasal dari subsektor minyak dan gas bumi yang mencapai Rp 4.690,52 milyar. Hal ini menggambarkan bahwa dari Provinsi Riau telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun hanya sebagian kecil dikembalikan dalam DBH SDA (15%).

Sementara itu sektor yang mengalami pertambahan PDRB secara riil yang paling rendah selama tahun 2004 – 2008 adalah sektor listrik dan air minum yang hanya naik sebesar Rp 61,26 milyar. Kondisi dapat dimaklumi bahwa selama perodesasi tahun tersebut investasi baru guna meningkatkan produksi untuk sektor yang berorientasi pada pelayanan publik ini relatif kecil.

Tabel 2.7

PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Termasuk Migas
(Milyar Rupiah) Tahun 2004 - 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	12.464,86	13.308,64	14.103,02	15.149,01	16.372,51
	- Tanaman pangan	1.649,39	1.689,45	1.724,88	1.783,42	1.856,69
	- Perkebunan	4.369,77	4.792,83	5.252,09	5.705,45	6.231,83
	- Peternakan	609,78	653,52	699,64	745,78	800,91
	- Kehutanan	4.679,81	4.920,27	5.074,52	5.454,16	5.895,81
	- Perikanan	1.156,11	1.252,57	1.351,89	1.460,20	1.587,27
2.	PERTAMBANGAN	42.334,54	43.906,87	45.183,66	46.588,95	47.361,04
	- Minyak dan gas	42.018,02	43.504,12	44.665,68	45.965,41	46.708,54
	- Pertambangan Non migas	76,28	144,63	229,67	307,63	321,92
	- Penggalian	240,24	258,12	288,31	315,91	330,58
3.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	7.549,37	7.972,12	8.512,38	9.382,29	10.193,07
	- Industri migas	2.318,92	2.266,92	2.287,55	2.571,81	2.695,26
	- Industri Non migas	5.230,45	5.705,20	6.224,83	6.810,48	7.497,81
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	151,55	165,49	175,20	192,49	212,81
5.	BANGUNAN	2.064,97	2.212,67	2.395,73	2.592,50	2.823,32
6.	PERDAGANGAN	5.121,97	5.631,81	6.278,66	6.621,66	7.030,44
7.	PENGANGKUTAN	1.794,89	1.982,65	2.173,44	2.404,04	2.675,48
8.	KEUANGAN DAN BANK	653,13	771,84	892,82	1.029,50	1.193,76
9.	JASA	3.081,36	3.325,43	3.655,89	3.968,31	4.374,83
	PDRB	75.216,36	79.287,52	83.370,08	87.928,75	92.237,26

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau 2004-2007, Tahun 2008 angka proyeksi

Dengan adanya peningkatan jumlah Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan tahun 2000 yang cukup besar pada tahun 2008 jika dibandingkan tahun 2004, maka tampak bahwa telah terjadi laju pertumbuhan ekonomi yang "positif" selama kurun waktu tersebut. Sekalipun pada periode itu diawali dengan laju pertumbuhan yang sangat rendah yakni 2,93% namun mulai tahun 2009 mengalami peningkatan terus hingga mencapai 5,47% pada tahun 2007 dan kembali turun pada tahun 2008 menjadi 4,90%.

Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, yakni kadangkala naik dan kadangkala mengalami penurunan. Hal ini disebabkan

kondisi perekonomian Provinsi Riau tidak bisa dipisahkan dengan kondisi perekonomian nasional dan regional Asean. Sekalipun fluktuasi perekonomian mengikuti konjungtur ekonomi nasional dan regional, namun sesuai dengan potensi yang ada dan peluang pengembangan ekonomi yang masih terbuka lebar, maka pertumbuhan ekonomi masih selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang selalu tinggi tersebut belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih merata hal ini disebabkan oleh karena laju pertumbuhan penduduk yang juga cukup tinggi, oleh karena pertumbuhan yang tinggi tersebut hanya untuk merespons laju pertumbuhan penduduk yang alami oleh Provinsi Riau, sehingga menimbulkan konsekwensi logis terhadap semakin berkurangnya cadangan sumberdaya alam yang bersifat *un-renewable*, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, semakin besarnya tuntutan terhadap penyediaan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang secara keseluruhannya membutuhkan biaya pembangunan dan investasi yang sangat besar.

Tabel 2.8 :

Pertumbuhan PDRB dan Sektor Provinsi Riau Termasuk Migas (Persen)
Tahun 2004 – 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1.	PERTANIAN	7,00	6,77	5,97	7,42	8,08
	- Tanaman pangan	3,44	2,43	2,10	3,39	4,11
	- Perkebunan	7,25	9,68	9,58	8,63	9,23
	- Peternakan	5,05	7,17	7,06	6,59	7,39
	- Kehutanan	8,26	5,14	3,13	7,48	8,19
	- Perikanan	7,33	8,34	7,93	8,01	8,70
2.	PERTAMBANGAN	-1,12	3,71	2,91	3,11	1,66
	- Minyak dan gas	-1,38	3,54	2,67	2,91	1,62
	- Pertambangan non migas	251,19	89,60	58,80	33,94	4,65
	- Penggalian	12,06	7,44	11,70	9,57	4,64
3.	INDUSTRI DAN PENGOLAHAN	9,53	5,60	6,78	10,23	8,64
	- Industri migas	8,20	-2,24	0,91	12,42	4,80
	- Industri Non migas	10,14	9,08	9,11	9,41	10,09
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	10,44	9,20	5,87	9,87	10,56
5.	BANGUNAN	9,10	7,15	8,27	8,21	8,90
6.	PERDAGANGAN	9,37	10,15	11,29	5,46	6,13
7.	PENGANGKUTAN	11,85	10,46	9,62	10,61	11,29
8.	KEUANGAN DAN BANK	18,92	18,18	15,67	15,31	15,96
9.	JASA	9,06	7,91	9,94	8,55	10,24
PDRB		2,93	5,41	5,15	5,47	4,90

Sumber : Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004- 2008, Bappeda Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau 2009.

3. Perekonomian Provinsi Riau ditinjau dari Perdagangan Internasional

Neraca perdagangan luar negeri dengan tanpa migas selama periode 2004 – 2008 menunjukkan posisi surplus, karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Laju perkembangan perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang berkepanjangan antara tahun 2004 – 2008 ditandai pertumbuhan positif dan negatif secara bergantian. Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan impor non migas hingga - 49,14% disebabkan oleh karena harga yang tidak stabil dan nilai tukar rupiah yang melemah. Sejak tahun 2004 kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan Dumai, Buatan, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok. Komoditi dengan nilai ekspor tertinggi adalah minyak bumi, *crude palm oil*, *pulp and paper*, *crumb rubber*, kertas dan barang dari kertas, minyak kelapa/kelapa, kayu lapis, dan kayu olahan. Tumbuhnya industri pengolahan kelapa sawit menjadi bahan setengah jadi (CPO) telah meningkatkan nilai ekspor.

Tabel 2.9 :

Jumlah Ekspor dan Impor melalui Provinsi Riau (US \$)
Tahun 2004 – 2008

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008*)
Ekspor	5.397.368,410	7.024.538,845	8.697.706,369	11.080.526,285	13.334.640,910
Impor	245.532,109	644.793,720	661.977,243	889.591,026	1.416.507,010
Surplus	5.151.836,301	6.379.745,125	8.035.729,126	10.190.935,259	11.918.133,900

Sumber : BPS Provinsi Riau. *) sampai bulan Oktober 2008

4. Kondisi Perekonomian Provinsi Riau ditinjau dari Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Riau selama tahun 2004 - 2008 relatif belum stabil dan berfluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan investasi rata-rata selama periode 2004 - 2008 rata-rata pertambahan investasi adalah sebesar 18,20%. Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau nyatanya cukup signifikan, yakni sebesar 56,19%. Adapun ICOR rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar 2,51, dengan inflasi sebesar 13,78%. Sedangkan realisasi investasi PMDN pada tahun 2004 sebesar Rp

86,10 milyar dan meningkat hingga dua belas kali lipat dibandingkan tahun 2005 sehingga menjadi Rp. 1.023,- milyar dan terus meningkat pada tahun 2006 dan tahun 2007 secara berturut-turut sebesar Rp. 2.500,9 milyar dan Rp. 3.095,3 milyar, sedang PMA berkembang secara berfluktuasi dari US \$ 512,8 juta menjadi US \$ 795,8 juta pada tahun 2004 ke tahun 2005. Selanjutnya investasi PMA pada tahun 2006 menurun menjadi US \$ 585,- serta kemudian meningkat lagi menjadi US \$ 724,- pada tahun 2007. Distribusi investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan Indragiri Hulu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar di Provinsi Riau. Sedang nilai realisasi PMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai.

Tabel 2.10
Jumlah Investasi Provinsi Riau (Milyar Rupiah)
Tahun 2004 - 2008

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	Jumlah
1.	PERTANIAN	13.522,98	17.455,94	21.142,80	25.510,05	25.642,49	114.297,67
	- Tanaman pangan	685,20	719,96	745,30	829,35	842,18	4.425,98
	- Perkebunan	7.434,45	10.010,56	12.384,21	15.198,09	15.466,02	66.356,52
	- Peternakan	329,71	376,05	435,80	493,95	561,54	2.486,71
	- Kehutanan	7.753,08	4.792,77	5.752,37	6.847,35	6.902,41	31.233,55
	- Perikanan	1.320,54	1.556,60	1.825,12	2.141,31	1.870,34	9.794,91
2.	PERTAMBANGAN	278,74	400,89	749,21	1.207,80	1.572,66	4.398,29
3.	INDUSTRI & PENGOLAHAN	13.284,01	15.867,77	18.420,90	22.237,59	22.423,98	102.607,42
4.	LISTRIK DAN AIR MINUM	148,20	169,86	190,26	222,84	235,14	1.098,35
5.	BANGUNAN	2.205,52	2.427,29	2.981,16	4.931,86	4.486,93	18.972,82
6.	PERDAGANGAN	3.553,47	4.379,93	5.366,27	6.752,45	6.386,33	29.214,29
7.	PENGANGKUTAN	1.309,25	1.535,90	1.833,22	2.194,76	2.187,63	10.151,67
8.	KEUANGAN DAN BANK	1.189,64	1.541,50	1.880,50	2.352,40	3.293,36	11.076,38
9.	JASA	2.238,20	2.585,98	3.129,42	3.608,37	3.499,86	16.926,57
	PDRB	30.208,04	37.730,01	46.365,06	55.693,74	69.728,38	308.743,46

Sumber : 1. Laporan bank Indonesia 2007, 2 APBD Kabupaten/Kota, 3 APBD Provinsi Riau, 4 Badan Promosi Investasi Provinsi Riau, 5 Badan Promosi Investasi Kabupaten/Kota

Mencermati laju pertumbuhan sektor migas menunjukkan penurunan yang cukup serius, walaupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan

Provinsi Riau sangat signifikan. Pengembangan sektor migas membutuhkan perhatian khusus, terutama penerapan teknologi *enhanced oil recovery* guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkesinambungan.

Pembangunan sektor non-migas yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan belum menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun potensi yang dapat dikembangkan cukup luas, seperti pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan agrobisnis; pemanfaatan hasil hutan non kayu; pariwisata; sektor informal dan usaha kecil menengah; dan industri rumah tangga.

Nilai produksi pertanian terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB menurut harga berlaku pada sektor pertanian, yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp. 11.649,22 milyar, dan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 16.372,51 milyar dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi yaitu pada tahun 2003 sebesar 6,32%; tahun 2006 menjadi 5,97% dan pada tahun 2008 naik menjadi 8,06%. Kondisi lahan pertanian senantiasa mengalami degradasi terhadap kualitas lahan yang mengakibatkan semakin miskinnya unsur hara, kurangnya ketersediaan air dengan jaringan irigasi teknis dan pengaturan air pada lahan pasang-surut yang sangat terbatas, rendahnya *input* pertanian berupa pupuk dan kapur, serta cara pengolahan yang tidak optimal mengakibatkan berkurangnya produktifitas dan menurunnya mutu produk pertanian. Umumnya pertanian diusahakan pada lahan dengan tingkat kesuburan rendah dan bermasalah, yaitu berupa tanah podzolik merah kuning (PMK), gambut air tawar, dan gambut pasang surut yang bersifat miskin unsur hara esensial dan mengandung unsur racun berbahaya yang lebih banyak. Tanah PMK umumnya tersebar di wilayah Riau bagian Barat dan Selatan dengan luas areal lebih dari 4 juta hektar, sedang rawa gambut tersebar di kawasan pesisir Riau bagian Timur dengan luas lebih dari 4,8 juta hektar.

Di samping itu, pengusahaan lahan pertanian juga menghadapi permasalahan konflik penguasaan dan status lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penguasaan lahan oleh petani sangat terbatas, sehingga menghadapi kendala dalam pengembangan skala usaha. Penguasaan sektor hilir oleh perusahaan berskala besar yang bersifat padat modal dan keahlian mengakibatkan hasil pertambahan nilai belum dinikmati oleh masyarakat lokal.

Mutu sumberdaya manusia relatif rendah, terutama pada sektor pertanian, merupakan salah satu permasalahan yang cukup mendasar dan serius dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pada Agustus 2007 terdapat sekitar 48,8% dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berada di sektor pertanian (berpendidikan masih di bawah SLTP). Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya serap teknologi di sektor pertanian, kurang berkembangnya inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usahanya dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan bagi rumah tangga pertanian, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut peran mediator dalam hal ini penyuluh pertanian menjadi sangat strategis dan penting guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemasaran hasil pertanian masih terkendala oleh ketersediaan infrastruktur, mutu produk, dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan pasar serta kelangsungan produksi yang tidak berkelanjutan.

Sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, maka pengembangan sektor pertanian perlu diupayakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, serta pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk meningkatkan nilai tambah sektor ini. Kendala yang dihadapi adalah intensifikasi tanaman hortikultura umumnya dilakukan pada lahan sempit, teknologi tradisional, dan modal terbatas, sedang pasar masih berskala lokal.

Pengusahaan hutan untuk fungsi produksi berupa HPH, HPHTI, HKM, dan HPHTC belum menunjukkan pengelolaan dan penyebaran yang optimal dan pada beberapa bagian wilayah menghadapi konflik kepentingan. Dalam rangka keberlanjutan dan pemerataan pembangunan dibutuhkan penataan kembali kawasan hutan dengan memprioritaskan kawasan hutan produksi pada HPHTI yang izin eksploitasinya telah berakhir; pemanfaatan lahan terlantar (hutan belukar atau hutan sekunder); serta pengembangan HKM dan HPHTC untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena industri perkayuan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, maka dukungan terhadap industri tersebut perlu dilakukan melalui penerapan pola pengelolaan yang lebih luas, seperti HPHTI-*pulp*, HPHTI-pertukangan, dan HPHTI-transmigrasi serta penerapan pola-pola kemitraan dengan masyarakat dalam pengusahaan lahan.

Provinsi Riau memiliki berbagai potensi sumber daya pertambangan di luar migas, seperti tambang golongan B dan golongan C. Deposit batubara di Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, dan Pelalawan; emas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi; pasir di Sungai

Kampar; dan Batu Kapur dan Kaolin di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Potensi batubara diperkirakan sekitar 2 milyar ton dan sebagian besar merupakan *low grade coal*. Potensi pertambangan tersebut masih pada tahap eksplorasi, sehingga pemanfaatannya pada masa mendatang perlu diupayakan melalui kegiatan eksplorasi, perencanaan eksploitasi dan pengolahan.

Kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan menjadi penting bagi pengembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, dan jasa kelautan lainnya. Potensi perikanan berupa ikan pelagis dan udang-udangan terdapat di sekitar Pulau Rupat, Pulau Jemur, dan sekitar Selat Malaka. Di samping perikanan tangkap, potensi budidaya perikanan untuk jenis-jenis ikan kerapu, kakap putih, udang-udangan, dan rumput laut dapat diusahakan di pesisir dan perairan laut dangkal di sekitar Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, pesisir Rokan Hilir, dan Selat Malaka.

Potensi pariwisata alam dan budaya belum dikembangkan secara optimal, baik obyek dan tujuan wisata, prasarana dan sarana pendukung serta tenaga pengelola pariwisata, sehingga sebagian besar belum layak dijual kepada wisatawan. Jika pada waktu lalu pengembangan pariwisata berorientasi ke Pulau Batam dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga potensi internal Provinsi Riau perlu dikembangkan secara intensif. Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah, pada tahun 2004 saja tercatat hanya sebanyak 59.272 orang mayoritas berasal dari negara ASEAN. Provinsi Riau hanya sebagai lokasi transit wisatawan menuju Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan wisatawan mancanegara cenderung dimanfaatkan oleh Kota Pekanbaru yang memiliki prasarana yang relatif memadai, seperti hotel, transportasi, dan perbankan. Sebenarnya Provinsi Riau memiliki pariwisata alam dan budaya, potensi lainnya yang didukung tempat *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)*; pariwisata bahari Pulau Jemur, Pulau Rupat, dan Tanjung Medang untuk pasar wisatawan dari Singapura dan Malaysia; dan pariwisata yang ditujukan untuk segmen wisatawan nusantara.

Adanya disparitas perkembangan ekonomi antara wilayah Riau bagian tengah dengan utara dan selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; antara kawasan pantai timur dengan wilayah bagian barat, yang antara lain disebabkan terjadinya pemusatan usaha skala besar pada pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah.

Sebagian masyarakat, khususnya di pedesaan masih memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Situasi itu dilihat dari tingkat perekonomiannya bersifat subsistem, produktifitas rendah, dan berkeahlian rendah. Akan tetapi

kelompok penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, jika tahun 2004 tercatat sebesar 14,67%, maka pada tahun 2005 menurun menjadi 12,51%, pada tahun 2006 menjadi 11,20%, tahun 2007 menjadi 11,20% dan tahun 2008 menjadi 10,63%. Hambatan dalam pengembangan investasi berbasis masyarakat lokal antara lain adalah terbatasnya kualitas SDM dan infrastruktur untuk peningkatan investasi. Rendahnya kemampuan penduduk tempatan juga mengakibatkan rendahnya daya saing dalam pasar kerja.

Pengembangan perekonomian membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi dan penataan ruang, kepastian hukum, dan pelayanan aparatur dalam administrasi umum. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan bidang pemerintahan dan aparaturnya menuju *good governance and clean government*.

5. Perekonomian Provinsi Riau Ditinjau dari Potensi Geostrategis, Kekayaan Alam, Kekayaan Budaya, Keamanan dan Ketertiban serta Pemanfaatan Peluang Eksternal.

Posisi Provinsi Riau yang strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand; berada pada jalur perekonomian Selat Malaka; dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi, dan modal; keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan dan sebagai lokasi transit. Sebagaimana kawasan lainnya di Indonesia, maka Provinsi Riau yang berada kawasan tropis basah sangat sesuai untuk pengembangan pertanian. Di samping itu, provinsi ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam lainnya, seperti migas, aneka tambang, dan kelautan. Kondisi geomorfologi berupa hamparan yang luas sangat mendukung pembangunan perkebunan, terutama tanaman keras. Lahan yang tersedia untuk dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan hortikultura masih tersedia cukup memadai, di samping pemanfaatan lahan terlantar dan hutan sekunder yang belum terpakai yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk domestik maupun ekspor. Hal ini terkait dengan masih luasnya pasar domestik dan internasional bagi produk pertanian dan kegiatan hilirnya.

Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang baik merupakan perwujudan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut terbangun oleh kehidupan masyarakat yang damai, toleransi antar etnis dan agama, serta kesiagaan dalam menghadapi gangguan sosial. Di samping itu, Budaya Melayu selama ini dipandang strategis dan mampu memayungi kehidupan

bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan potensi yang fundamental bagi kelangsungan kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan peran secara khusus bagi Provinsi Riau melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi provinsi ini secara terpadu dengan wilayah nasional lainnya, antara lain pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan, dan jasa; penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan *biofuel* dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya; kebijakan Tatranas yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional; kebijakan penataan ruang nasional yang menempatkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan sebagainya.

6. Perekonomian Provinsi Riau ditinjau dari Hambatan dan Kendala Pengembangan

Berbagai persyaratan dan standar internasional mutu produk dan pelayanan dapat menjadi *entry barrier* untuk memasuki pasar global. Perdagangan bebas juga memberikan peluang yang besar bagi produk luar negeri untuk memasuki pasar domestik, oleh karena memiliki kualitas yang mampu bersaing. Hadirnya *new growing economic countries* di Asia Tenggara, seperti China dan Vietnam menurunkan daya saing dalam pasar regional dan internasional.

Kebijakan dan strategi negara-negara tetangga yang lebih maju dalam berinvestasi pada bidang perkebunan dan kehutanan telah menghilangkan peluang untuk memperoleh keuntungan dari nilai tambah produk primer. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Indonesia secara umum menurunkan minat investasi oleh pihak asing sebagaimana terlihat dari jumlah dan nilai investasi yang fluktuatif.

C. Sosial Budaya Daerah

1. Bidang Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2004 sebesar 4.413.422 jiwa dan pada tahun 2007 menjadi 5.070.952 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 2.678.100 jiwa dan perempuan sebesar 2.392.852 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3,53% setahun. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau bersama tiga provinsi lainnya tergolong tertinggi di Indonesia. Fenomena

distribusi kependudukan menunjukkan bahwa penambahan penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk perdesaan. Gejala tersebut selain disebabkan oleh perubahan kawasan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan selama itu lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Di samping itu, industrialisasi telah memacu pembangunan fasilitas secara fisik maupun non fisik di beberapa kawasan yang mengubah rona fisik perdesaan menjadi perkotaan.

Laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi walaupun pelaksanaan Keluarga Berencana relatif berhasil. Walaupun laju migrasi masuk cenderung menurun dari 20,6% pada tahun 2000 menjadi 19,9% pada tahun 2006, namun secara absolut tetap signifikan terhadap penambahan penduduk, sehingga kelebihan penduduk dari pertumbuhan tingkat kelahiran dianggap sebagai migrasi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya jumlah penganggur, penduduk miskin, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

Distribusi penduduk yang relatif tidak merata serta terkonsentrasinya sebagian permukiman mengikuti pola aliran sungai, antara lain Sungai Siak, Kampar, Indragiri, dan Rokan menimbulkan kendala bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan program pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Konsentrasi penduduk di kawasan tertentu, seperti perkotaan, kawasan perkebunan, pusat industri, dan pusat pemerintahan menyebabkan pembangunan dan penyediaan prasarana transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi, serta distribusi bahan pokok bagi masyarakat luas tidak dapat diselenggarakan secara efisien.

Dampak globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah, telah mendorong kondisi kependudukan di Provinsi Riau yang semakin heterogen karena tingginya tingkatnya mobilitas penduduk, hal ini disebabkan oleh karena posisi Provinsi Riau yang berbatasan dengan negara tetangga dan tingkat kemajuan serta perkembangan daerah yang sangat pesat, sehingga menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah transit bagi pekerja Indonesia yang akan menuju/kembali ke/dari negara lain. Kebijakan memobilisasi penduduk dari luar Provinsi Riau

melalui program transmigrasi telah mampu mendorong perkembangan daerah sehingga beberapa kawasan telah tumbuh secara pesat menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, membuka isolasi kawasan tertinggal dan terpencil serta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, namun demikian hal tersebut belum dapat menyeimbangkan penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Riau secara merata.

Sebagai dampak kebijakan pada masa lalu yang bersifat sentralistik, dimana kegiatan perusahaan perkebunan negara dan swasta berskala besar mendatangkan tenaga kerja dan keluarganya dari luar Riau dan sekaligus berfungsi sebagai petani plasma, telah menimbulkan masalah kemiskinan dan disparitas kesejahteraan bagi sebagian penduduk. Perusahaan swasta berskala besar yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit, karet, dan lainnya cenderung mendatangkan tenaga kerja dari luar Riau dan mengabaikan kondisi setempat. Kegiatan tersebut antara lain berlangsung melalui perkebunan pola PIR, dimana bagian masyarakat setempat hanya 20% dan 80% untuk transmigran. Sejumlah 20% kelompok masyarakat setempat tidak selalu terpenuhi dan akan kembali dimanfaatkan oleh transmigran.

Ketimpangan struktur ekonomi Riau yang didominasi oleh perkembangan produksi minyak dan gas bumi, yaitu pada tahun 2003 peranan minyak dan gas bumi pada PDRB sebesar 47,09% dan di tahun 2007 sebesar 44,23%, berakibat pada pola distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat baik di tahun 2003 dan di tahun 2007 terlihat adanya ketimpangan yang sangat menyolok, yaitu pada tahun 2003, sebesar 40% penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menerima 3,45% dari jumlah pendapatan, 40% penduduk yang berpenghasilan menengah menerima 10,29% dari jumlah pendapatan, dan 20% penduduk berpenghasilan tinggi menerima 86,26% dari jumlah pendapatan. Keadaan ini diperkuat dengan angka Indeks Gini Ratio sebesar 0,8287. Keadaan ini pada tahun 2007 memang terjadi sedikit perubahan tetapi perubahan tersebut tidak mengubah pola distribusi pendapatan Provinsi Riau, yaitu 40% penduduk yang berpenghasilan rendah menerima 3,99% dari jumlah pendapatan, 40% penduduk yang berpenghasilan menengah menerima 12,02%, dan 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima 83,99%, dengan Indeks Gini Ratio sebesar 0,8116.

Distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat yang dipakai sebagai salah satu ukuran pemerataan hasil-hasil pembangunan tanpa minyak dan gas dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2007, menunjukkan bahwa pada

tahun 2003 sebesar 40% penduduk yang berpenghasilan rendah telah menerima sebanyak 20,67% dari jumlah pendapatan, dan kelompok 40% penduduk yang berpenghasilan menengah telah menerima 45,91%, dan kelompok 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima 22,42%, dengan angka Indeks Gini Rasio sebesar 0,3048, dengan kriteria tingkat pemerataan yang baik. Pada tahun 2007 terjadi perubahan pola distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat, yaitu 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima 15,96% dari jumlah pendapatan, kelompok 40% penduduk berpenghasilan sedang telah menerima 46,69%, dan 20% penduduk berpenghasilan tinggi menerima 37,35%, dengan angka Indeks Gini Rasio adalah 0,3657.

Tabel 2.11
Pola Distribusi Pendapatan
Menurut Kelompok Masyarakat Provinsi Riau (Persen)
Tahun 2003 - 2007

Kelompok Masyarakat	Termasuk Migas		Tanpa Migas	
	2003	2007	2003	2007
1. 40% Penduduk yang berpenghasilan rendah menerima	3,45	3,99	20,67	15,96
2. 40% Penduduk yang berpenghasilan sedang menerima	10,29	12,02	45,91	46,69
3. 20% Penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima	86,26	83,99	33,42	37,35
4. Indeks Gini Ratio	0,8287	0,8116	0,3048	0,3657

Sumber : *Diolah Dari Data Indeks Kesejahteraan Tahun 2003 dan Tahun 2007, Data Pendapatan Regional Provinsi Riau Tahun 2003-2006*

Turunnya bagian pendapatan yang diterima 40% penduduk berpenghasilan rendah, menunjukkan bahwa pola distribusi investasi menurut sektor tidak berimbang. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja terutama di daerah pedesaan seperti subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan dan sub- sektor perikanan, memperoleh investasi relatif sedikit, demikian juga dengan sektor perdagangan khususnya untuk perdagangan kecil, perdagangan informal yang jumlahnya cukup besar dan subsektor industri kecil, industri rumah tangga serta sektor pengangkutan khususnya angkutan darat seperti angkutan kota dan ojek.

2. Bidang Ketenaga Kerjaan

Angkatan kerja di Provinsi Riau pada tahun 2004 berjumlah 1.857.960 orang atau 41,37% dari jumlah penduduk, maka pada tahun 2008 jumlah tersebut meningkat secara kuantitatif menjadi 2.115.084 orang, walaupun jumlah pekerja perempuan lebih tinggi, namun fenomena menunjukkan bahwa kesempatan kerja cenderung dimasuki oleh pekerja laki-laki. Data Riau Dalam Angka 2008 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian (51,5%); perdagangan, rumah makan, dan hotel (15,8%); jasa-jasa (11,1%); angkutan dan komunikasi (7,2%); serta bangunan dan konstruksi (6,2%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk laki-laki dan perempuan tertinggi tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebesar 92,3% dan yang terendah tercatat di Kota Dumai, yaitu sebesar 80,1%.

Dari data BPS (2004) jumlah pencari kerja sebanyak 279.560 orang dan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 224.849 orang. Jika pencari kerja dianggap sebagai penganggur, maka berarti kurang dari 10% dari penduduk usia kerja belum memperoleh kesempatan kerja. Kondisi tersebut relatif setara dengan kondisi pada tahun 2007, dimana angka pengangguran tercatat sebesar 10,39%.

Tabel 2.12 :

Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka (Orang)
Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008

No	Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	Pert (%)
1.	Penduduk	4.491.393	4.614.930	4.764.205	5.070.952	5.249.957	3,53
	- Penduduk Umur 0-4	470.778	472.772	455.059	459.665	475.891	-
	- Penduduk umur 5-9	556.341	430.940	547.775	549.575	568.975	-
	- Penduduk umur 10-14	494.461	512.934	525.628	535.397	554.297	-
	- Penduduk umur 15 tahun keatas	2.969.813	3.098.284	3.235.763	3.526.415	3.650.794	4,72
2.	Angkatan Kerja	1.857.960	1.885.077	1.975.664	2.115.084	2.241.433	18,82
3.	Pencari Kerja	279.560	241.932	202.387	207.138	224.849	-
4.	Pengangguran Terbuka (%)	17,71	14,71	11,41	10,85	11,15	-
5.	Kesempatan Kerja	1.578.400	1.642.145	1.773.277	1.907.946	2.016.584	4,71
	- Pertanian	823.654	858.379	977.638	931.467	981.979	5,42
	- Pertambangan	17.560	50.773	37.511	42.079	42.580	1,19
	- Industri	69.953	59.318	94.859	123.387	129.976	-5,34
	- Listrik dan air minum	571	3.296	1.691	4.274	4.598	7,59
	- Bangunan	79.528	132.930	97.684	98.067	102.931	4,96
	- Perdagangan	240.956	224.947	277.579	333.551	348.76	4,56
	- Pengangkutan	73.020	85.608	99.152	111.063	115.839	4,30
	- Keuangan dan bank	75.568	18.896	14.438	16.141	17.211	-6,63
	- Jasa	197.590	209.008	172.725	247.917	272.709	12,55

Sumber : *Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2002-2006, Bappeda dan BPS Provinsi Riau Tahun 2008. Tahun 2008 Angka Proyeksi*

Pesatnya perkembangan Provinsi Riau telah mendorong migran risen untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 23.836 orang yang terdiri dari 13.664 orang laki-laki, dan 10.172 orang perempuan. Data ini

diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar untuk mencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Dilihat dari data Susenas 2005, ternyata Kota Dumai menempati jumlah pencari kerja yang terbesar di Provinsi Riau yaitu sebesar 12,15% orang laki-laki dan 7,95% orang perempuan. Kemudian Kabupaten Bengkalis sebesar 10,76% orang laki-laki dan 8,04% orang perempuan. Pada urutan ketiga adalah Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki jumlah pencari kerja perempuan terbesar (8,72%).

Tingginya angka migrasi risen memberikan implikasi terhadap kesempatan kerja yang semakin terbatas bagi penduduk setempat, akan tetapi dengan kebijakan otonomi daerah, maka peluang bekerja bagi tenaga kerja tempatan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan peran serta membangun daerah.

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan yang ditamatkan adalah meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik dari sekolah negeri maupun swasta. Dengan adanya perbedaan batas usia terendah yang digunakan oleh Sensus Penduduk tahun 2000 yang dimulai pada usia 5 (lima) tahun ke atas dan Sensus Penduduk sebelumnya yang dimulai pada usia 10 tahun, telah menimbulkan variasi yang besar dalam pencatatan tingkat pendidikan penduduk. Menurut Sensus Penduduk tahun 2000 yang menggunakan batas usia 5 (lima) tahun ke atas untuk kategori tamat/tidak tamat SD tercatat sebesar 32,2% untuk Provinsi Riau, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan menurut SUSENAS tahun 2007 penduduk berumur 7 - 24 tahun yang bersekolah telah mencapai 85,44%.

Pada skala nasional, Bappenas bersama BPS mencatat 32% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD pada tahun 2000 turun menjadi sebesar 22,9% pada tahun 2006, dengan catatan terdapat perbedaan batas usia terendah dalam kategori usia sekolah. Proporsi penduduk yang telah menamatkan pendidikan SD sebesar 30,5% dan pendidikan tinggi sebesar 1,5% pada tahun 2000 naik masing-masing menjadi 33,8% dan 2,2% pada tahun 2006.

Keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Provinsi Riau telah meningkat secara nyata jumlah penduduk yang tamat SLTP dan SLTA sehingga angka partisipasi pendidikan (APK) untuk SD/MI telah mencapai 108,45, SMP/MTs sebesar 98,44 dan SMA/SMK/MA sebesar 76,10 pada tahun 2008.

4. Bidang Kesehatan

Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, maka hal tersebut telah diikuti dengan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan baik dari sisi sumberdaya daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Dari sisi sumberdaya manusia tahun 2007, jumlah dokter spesialis telah mencapai sebanyak 440 orang, dokter umum 768 orang, dokter gigi 523 orang, tenaga perawat umum sebanyak 4.302 dan bidan sebanyak 2.124 orang.

Keberadaan lembaga pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit, PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu (PUSTU), dan PUSKESMAS Keliling (PUSKEL) serta jumlah daya tampung lembaga tersebut yang tergambar dari jumlah tempat tidur yang tersedia, telah mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya, dimana pada tahun 2007 jumlah tersebut mencapai sebanyak 39 Rumah Sakit, 175 PUSKESMAS, 792 PUSTU, 172 (PUSKEL) dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.267 untuk seluruh Rumah Sakit dan 493 untuk PUSKESMAS Rawat Inap. Keberadaan lembaga pelayanan kesehatan tersebut belum termasuk kelembagaan Poliklinik dan Bidan Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan keberadaan Balai Pengobatan, Poliklinik, dan dokter praktet umum serta lembaga pendukung pelayanan kesehatan berupa apotek, laboratorium klinik yang dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam rangka perluasan jaringan pelayanan masyarakat (JPKM), terutama bagi kelompok masyarakat miskin/tidak mampu, maka telah terlaksana program pelayanan Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (ASKESKIN) yang kemudian dikembangkan menjadi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan kualitas kesehatan di Provinsi Riau pada akhir-akhir ini kecendrungan menunjukkan berkembangnya *Re-emerging disease* (seperti Filariasis), *Neo Emerging Disease* (seperti Aviant Influenza, HIV/AIDS, demam berdarah) dan gizi buruk yang masih menimpa masyarakat di sejumlah daerah baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan terutama pada daerah yang sulit dan terpencil yang masih cukup banyak terdapat di Provinsi Riau. Masih rendahnya kualitas pelayanan pada rumah sakit yang ada di Provinsi Riau, telah menyebabkan paling tidak sekitar 3.000 orang setiap tahunnya yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan berobat ke Rumah Sakit yang ada di Malaysia.

5. Indikator Pembangunan Sumberdaya Manusia

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dengan menghitung indeks komposit dari 3 indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel usia harapan hidup, pendidikan yang menggunakan variabel jumlah penduduk yang melek huruf dan lamanya menempuj jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung tingkat daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Berdasarkan perhitungan IPM yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP, maka IPM Provinsi Riau pada tahun 2006 telah mencapai 73,8; dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 74,6 sehingga pada skala nasional besaran IPM Provinsi Riau berada pada peringkat ke “tiga”, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Tabel 2.13 :
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kota/Kabupaten
di Provinsi Riau Tahun 2007

No	Kota/Kabupaten	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Rata2 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	IPM
1.	Pekanbaru	70,9	99,8	11,3	632,1	77,0
2.	Dumai	70,8	99,3	9,7	640,9	76,3
3.	Kampar	68,1	98,1	8,2	634,4	73,0
4.	Bengkalis	70,1	97,3	8,6	624,0	73,4
5.	Indragiri Hulu	68,6	97,6	7,7	637,2	73,0
6.	Indragiri Hilir	70,7	98,5	7,6	632,0	73,9
7.	Kuantan Singingi	68,0	97,8	7,8	633,1	72,5
8.	Pelalawan	68,5	97,6	7,7	618,4	71,4
9.	Rokan Hulu	67,1	97,4	7,5	630,7	71,4
10.	Rokan Hilir	67,0	97,4	7,2	629,3	71,1
11.	S i a k	71,2	98,2	8,8	634,2	75,2
12.	Kep. Meranti	Masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis				
	Provinsi Riau	71,0	97,8	8,4	634,1	74,6

Cukup tinggi IPM yang dicapai oleh Provinsi Riau, tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh sektor Kesehatan dengan menggunakan variabel Usia Harapan Hidup yang pada tahun 2006 sebesar 70,8 tahun, maka pada tahun 2007 meningkat menjadi 71,0 tahun. Indikator kesehatan tersebut secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas pada beberapa variabel, antara lain lamanya sakit, jumlah penduduk yang berobat, dan pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Kondisi tersebut juga berdampak pada penurunan angka kematian kasar (*Crude Death Rate*) dan angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*). Penurunan angka kematian bayi pada tahun 2004 angka kematian bayi tercatat sebesar 15 per 100.000 kelahiran dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 4 per 100.000 kelahiran. Semakin menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup ditunjukkan oleh piramida penduduk dengan proporsi bagian tengah menjadi semakin besar, sehingga bagian penduduk dewasa dan usia lanjut menjadi semakin besar.

6. Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Politik

Sejalan dengan keberhasilan pembangunan yang dilakukan diberbagai bidang dan sektor, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dan keberhasilan pembangunan juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dengan timbulnya berbagai permasalahan sosial, seperti adanya kelompok masyarakat yang masih tertinggal (Komunitas Adat Terpencil), korban penyalahgunaan obat, NARKOBA, dan bahan psykotropika lainnya, fakir miskin, anak terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Guna mengatasi masalah di bidang kesejahteraan sosial tersebut, Pemerintah bersama masyarakat telah melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS. Sampai saat ini jumlah PMKS yang telah memperoleh jangkauan pelayanan sosial mencapai sebesar 19,9%, sedangkan untuk kelompok rentan sekitar 54,9%.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau memberikan pengaruh signifikan bagi Budaya Melayu dari penetrasi budaya asing dan semakin heterogennya budaya dari berbagai daerah di Indonesia yang berkembangnya di Riau. Di

samping pengaruh globalisasi, terbukanya akses informasi melalui perkembangan teknologi informasi, dan semakin tingginya arus mobilitas manusia yang masuk ke Provinsi Riau menjadi fenomena yang menyaring yang terbaik. Nilai-nilai ke-Melayu-an yang terimplementasikan dalam wujud tata laku, tata bahasa, tata boga (makanan), tata busana (pakaian) dan adat istiadat dalam perkawinan dan pergaulan sosial menjadi akar budaya masyarakat.

Pembangunan di bidang kebudayaan telah dilakukan melalui kebijakan untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai budaya Melayu yang diawali beberapa tahun lalu oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui penggunaan simbol-simbol Melayu untuk bangunan kantor, nama jalan dan perkantoran; berpakaian Melayu pada jam kerja hari-hari tertentu, acara-acara nasional dan daerah tertentu; menyajikan makanan khas Melayu; penggunaan adat istiadat Melayu dalam perkawinan, khitanan, peringatan Hari Besar Islam; dan penerapan kurikulum lokal pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun informal.

Melalui Visi Riau 2020 beserta berbagai program yang menyertai memberikan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat tentang konsep Melayu yang tidak dapat dipisahkan antara budaya Melayu dan masyarakat Riau. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu sesuai Visi Riau 2020, dipandang belum optimal. Sikap masyarakat Riau dalam konteks budaya, menempatkan aspek keMelayuan, baru sebatas simbol-simbol artifisial dan relatif belum diimplementasikan secara nyata serta belum menjadi "ruh" yang kuat diberbagai aspek secara proporsional. Sementara itu budaya Melayu yang diidentikkan dengan Islam, relatif belum memberikan determinasi positif terhadap aspek moralitas dan perilaku yang belum mencirikan penerapan nilai-nilai yang Islami.

Keberhasilan lainnya pembangunan dalam bidang politik ditandai pula dengan telah berhasil dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) di seluruh Kabupaten/Kota yang berlangsung dengan lancar, aman dan tertib serta dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dari para pemilih yang berhak memberikan suaranya. Keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari kesadaran politik publik dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung telah tumbuh secara positif dan cenderung menguat dengan dipahaminya pluralitas dan kemajemukan sebagai penajaman demokratisasi di tingkat lokal.

Dari aspek stabilitas kehidupan masyarakat, maka kondisi di Provinsi Riau berjalan dengan baik dan sangat kondusif untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pada masa mendatang. Dengan kehidupan beragama yang

cukup religius, toleransi dan kerukunan yang harmonis, semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang terjaga, budaya dan falsafah hidup masyarakat Melayu yang masih kental, tekanan ekonomi dan tingkat persaingan hidup yang relatif masih rendah, menjadikan masyarakat Provinsi Riau menjadi relatif dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang berpotensi untuk terjadinya konflik. Semakin berkembangnya suasana religius masyarakat ditandai oleh semakin banyaknya jumlah tempatan peribadatan, sekolah keagamaan yang diikuti oleh semakin tinggi kesadaran para orang tua untuk membekali anaknya dengan pendidikan keagamaan, dan semakin nyamannya masyarakat dalam melaksanakan ibadah tanpa adanya gangguan yang berarti.

D. Prasarana dan Sarana Daerah

1. Prasarana dan Sarana Umum

Sistem prasarana dan sarana merupakan pendukung utama berfungsinya sistem sosial, ekonomi, dan penataan ruang. Prasarana dan sarana wilayah utama yang mendukung pembangunan meliputi bidang transportasi, kelistrikan dan energi, telekomunikasi dan Air Bersih.

1) Bidang Transportasi

Sesuai dengan kondisi geografis dan letak strategis Provinsi Riau yang merupakan pintu gerbang masuk dari Timur Sumatera, maka keterpaduan antar moda transportasi di Provinsi Riau merupakan prasyarat pembentukan struktur ruang dan pemerataan perkembangan wilayah. Posisi strategis tersebut memperkuat kepentingan integrasi moda transportasi yang melayani jarak jauh, kapasitas massal, angkutan berat, kecepatan tinggi, dan ongkos angkutan yang rendah. Keterpaduan antar moda transportasi membutuhkan dukungan sejumlah terminal.

(1) Transportasi Darat;

Jaringan jalan tercatat sepanjang 24.109,41 km, terdiri atas jalan negara sepanjang 1.126,11 km, jalan provinsi sepanjang 3.033,32 km, dan jalan kota/kabupaten sepanjang 19.949,98 km. Jaringan jalan belum tersebar merata ke seluruh bagian wilayah Provinsi, ditunjukkan oleh indeks aksesibilitas di wilayah bagian selatan lebih rendah dibandingkan bagian utara dan tengah. Layanan transportasi jalan di wilayah pesisir sangat terbatas disebabkan kondisi tanah gambut relatif tinggi, sehingga cenderung menggunakan angkutan sungai dan laut.

Selain distribusi prasarana jalan, lebih dari sepertiga jaringan jalan yang ada juga dalam kondisi rusak dan sebagian belum diperkeras dan diaspal. Sebagian jaringan jalan yang rusak adalah jalan kabupaten/kota, sehingga menjadi kendala bagi kegiatan koleksi-distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia antara pusat-pusat utama dengan pusat lokal, sentra produksi dan pusat pemasaran.

Permasalahan transportasi lainnya adalah terbatasnya jembatan yang melintasi beberapa muara sungai disebabkan oleh tingginya frekuensi pelayaran dan kondisi tanah gambut yang menyebabkan biaya konstruksi jembatan menjadi tinggi, di samping keberadaan jembatan yang telah melampaui umur teknis yang membutuhkan perbaikan. Dukungan prasarana dan pelayanan terminal sebagai pemadu moda transportasi pada pusat-pusat kegiatan belum memadai, termasuk kebutuhan terminal untuk angkutan barang, khususnya untuk jarak jauh.

Sesungguhnya posisi geografis Riau merupakan jalur lintasan bagi pergerakan barang, jasa, dan orang arah Utara – Selatan antara Sumatera Utara dengan Sumatera bagian Selatan serta arah Timur – Barat antara Malaysia dan Singapura dengan Sumatera Barat. Dalam posisi tersebut, maka diperlukan penguatan struktur jaringan jalan, keterpaduan moda transportasi, serta kualitas prasarana dan pelayanannya yang memadai. Pada tingkat tertentu terdapat kebutuhan jalan *highway* sebagai arteri primer untuk memperkuat struktur jaringan jalan; pusat-pusat pemadu antar moda (*transshipment point*); peningkatan dan pemeliharaan jalan pada seluruh jaringan; dan pembangunan jalan baru yang berfungsi sebagai *feeder road*.

Kebijakan nasional pembangunan transportasi dan penataan ruang pada skala Pulau Sumatera mengindikasikan kebutuhan pembangunan jaringan kereta api Lintas Sumatera (*Trans Sumatera Railway*) untuk pergerakan jarak jauh, berat, dan massal. Dalam perspektif pembangunan Riau sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api dikaitkan dengan angkutan produk pertanian, perkebunan dan SDA lainnya.

(2) Transportasi Sungai dan Penyeberangan;

Jika pada masa lalu peran sungai sangat menonjol bagi pergerakan barang dan orang, pada saat ini cenderung menurun dengan semakin luasnya prasarana jalan dan adanya pendangkalan sungai yang menghambat alur pelayaran. Peran angkutan sungai pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan hulu dan perdesaan yang belum terlayani

jaringan jalan. Dalam rangka memantapkan sistem transportasi terpadu, maka dibutuhkan revitalisasi angkutan sungai melalui pengelolaan DAS untuk memulihkan kondisi alur pelayaran, pembangunan dermaga sungai, dan penyediaan sarana kapal dan perahu;

Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh pembangunan prasarana dan sarana penyeberangan antar provinsi dan antar negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulau-pulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga.

(3) Transportasi Laut;

Provinsi Riau memiliki 108 pelabuhan umum dan khusus, 11 pelabuhan diantaranya terbuka untuk perdagangan luar negeri, yakni Pelabuhan Dumai, Pekanbaru, Bagan Siapi-api, Rengat, Selat Panjang, Kuala Enok, Sungai Pakning, Tembilahan, Sungai Guntung, Siak Sri Indrapura, dan Buatan.

Sebagaimana kondisi transportasi laut secara umum di Indonesia, pelabuhan belum dapat berperan sepenuhnya sebagai pusat informasi pelayaran dan angkutan barang serta sebagai sarana pelayanan angkutan barang dan penumpang. Pelabuhan laut, sungai yang telah berfungsi untuk ditingkatkan fungsinya antara lain Pelabuhan Dumai dengan pelabuhan pengumpan Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Lumba-Lumba, dan Bagan Siapi-api; Pelabuhan Kuala Enok dengan pelabuhan pengumpan Perigi Raja, Sungai Guntung, Kuala Gaung, Pulau Kijang, Kuala Mandah, Rengat, Sapat, Tembilahan, dan Pulau Palas; Pelabuhan Mengkapan Buton dengan pelabuhan pengumpan Bengkalis, Bandul, Tanjung Samak, Sei Pakning, Siak Kecil, Perawang, Pekanbaru, dan Tanjung Kedabu; serta Pekanbaru.

Upaya pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan Pekanbaru sebagai pelabuhan internasional diupayakan melalui peningkatan kapasitas angkutan barang; keselamatan pelayaran dan kelengkapan fasilitas kepelabuhanan sesuai persyaratan internasional; dan fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina.

(4) Transportasi Udara;

Provinsi Riau memiliki 7 (tujuh) bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99% penerbangan domestik dan

internasional. Pelayanan transportasi udara perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara, pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai, dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai-Dumai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran kota Dumai sebagai PKN; peningkatan pelayanan Bandara Japura, Pasir Pangaraian, Sei Pakning, SSH Setia Negara-Pelalawan, dan Tempuling.

Guna memberikan pelayanan yang semakin luas dalam bidang transportasi udara bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang potensial tetapi belum dapat dilayani oleh transportasi udara, maka Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten/kota pada kedua provinsi tersebut telah mendirikan dan mengembangkan maskapai penerbangan Riau Air Lines (RAL). Dengan penambahan Armada RAL beberapa tahun terakhir telah melayani penerbangan masyarakat bukan hanya dalam Provinsi Riau dan Kepulauan Riau juga ke Melaka dan Jakarta.

2) Bidang Kelistrikan dan Energi

Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat – Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166 Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 x 10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2 x 50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kecamatan, dan desa-desa yang belum terlayani oleh sistem interkoneksi.

Rasio elektrifikasi tercatat sebesar 38 % atau lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 57%. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan.

Penyediaan listrik dan sumber-sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan, dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah

pembangunan PLTG dan PLTU dengan memanfaatkan aliran Sungai Indragiri, Kampar, Rokan Kiri, dan Rokan Kanan, sumber gas alam, dan batubara. Sedangkan sumber energi untuk bahan bakar dan perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan nabati. Rencana pengembangan Dumai sebagai pusat *biofuel* dapat mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan bakar pada masa depan.

3) Bidang Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi di Provinsi Riau pada saat ini mengalami perkembangan yang relatif pesat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya sejumlah perusahaan provider dibidang telekomunikasi yang mencakup sistem sambungan telepon rumah, sistem sambungan telepon mobil (CDMA) dan sistem seluler (GSM) yang telah dikembangkan kearah 3G, serta sistem telekomunikasi internet/WAP, kondisi tersebut menyebabkan terdapat ratusan menara BTS (*Base Transmission Station*) di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Tingkat sambungan telekomunikasi dengan berbagai modus sambungan diperkirakan telah mencapai sekitar sepertiga dari jumlah rumah tangga serta telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Riau. PT Telkom sebagai BUMN yang telah memotori berkembangnya usaha jasa dalam bidang telekomunikasi, didukung oleh *central gateway* di Pekanbaru, 24 STO di ibukota Kabupaten/Kota dan ibukota kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, serta *repeaters*. Untuk mendukung pelayanan telekomunikasi internasional, juga telah menyediakan Sentral Gerbang Internasional (SGI) 3 di Pulau Batam dan transmisi gelombang mikro yang mampu mengantisipasi kebutuhan Provinsi Riau hingga dua dekade mendatang. Kapasitas terpasang dan tersambung pada pusat perkotaan yang berpenduduk padat mencatat *occupancy rate* hingga 60%, sedangkan SST pada pusat-pusat ibukota kabupaten baru relatif masih terbatas.

4) Bidang Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan air tanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), sungai, situ, dan pelayanan PDAM. Kebutuhan air di Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hilir sebagian tergantung air hujan, oleh karena air permukaan umumnya bersifat payau dan mengandung bahan organik dan zat besi yang tinggi. Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dari jumlah

rumah tangga. Pelayanan air bersih di Kota Pekanbaru baru menjangkau sekitar 18% dari jumlah rumah tangga yang ada. Demikian pula halnya dengan kota-kota lainnya yang menjadi ibukota kabupaten tingkat pelayanan air bersih perkotaan masih rendah.

Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pusat-pusat perdesaan dan sentra-sentra produksi. Sistem penyediaan air bersih pada skala kecil dengan memanfaatkan sungai, air tanah, dan air hujan sebagai sumber air baku dapat diupayakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Peran para pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat dalam pengembangan prasarana air bersih perlu diperkuat dan disinergikan.

2. Prasarana dan Sarana Sosial

Secara umum penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana sosial telah cenderung menyebar ke seluruh wilayah Provinsi Riau, terutama untuk pelaksanaan ibadah keagamaan oleh masing-masing pemeluk agama. Sedangkan prasarana sosial yang bertujuan untuk rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan serta pembinaan organisasi dalam bentuk panti-panti sosial relatif masih terbatas, yakni cenderung berada di perkotaan. Keberadaan prasarana sosial yang relatif terbatas namun sangat dibutuhkan pada saat ini adalah prasarana untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk aspek sosial budaya.

Bagi daerah yang memiliki dinamika pembangunan yang tinggi seperti halnya Provinsi Riau, pada dasarnya akan memiliki dampak sosial yang harus berupaya dieliminasi. Upaya untuk mengeliminasi tersebut diperlukan keberadaan infrastruktur sosial yang kuat dan memiliki kapasitas yang memadai. Namun sejalan kemajuan dan perkembangan pembangunan serta dinamika sosial masyarakatnya, maka pertumbuhan dan perkembangan organisasi sosial kemasyarakatan kurang diimbangi dengan penguatan kapasitas organisasi dan relatif masih rendahnya kompetensi yang dimiliki untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

E. Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan tanggungjawab pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diwujudkan melalui keberadaan 12 (dua belas) daerah otonom

setingkat Kabupaten/Kota. Namun kinerja penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala terkait dengan belum optimalnya; (1) koordinasi internal dan antar instansi pada pemerintah daerah, sehingga terjadi duplikasi atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan daerah; (2) transformasi birokrasi secara kultural sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik; (3) kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan umum; dan (4) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan kewenangan.

Apresiasi pemerintah daerah terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah awal yang baik, pada saat ini telah diambil kebijakan pelayanan umum melalui partisipasi masyarakat. Kebijakan *community charter based* perlu dimantapkan dalam rangka menyongsong terwujudnya masyarakat yang madani dengan kemajuan di seluruh aspek kehidupan yang demokratis, sehingga pada masa mendatang kemitraan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Sejak reformasi dan adanya kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata melalui perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah serta adanya tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik, kondisi ini mendorong dilakukannya pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi 2 Provinsi yakni Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Setelah pemekaran dilakukan, Provinsi Riau memiliki 7 Kabupaten /Kota. Pada saat ini telah pula berkembang menjadi 12 Kabupaten/ Kota.

Tabel 2.14

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2009

No	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total Desa/Kel
1.	Pekanbaru	12	0	58	58
2.	Dumai	5	0	31	31
3.	Kampar	20	240	8	248
4.	Bengkalis	8	83	19	102
5.	Indragiri Hulu	13	178	16	194
6.	Indragiri Hilir	20	174	18	192
7.	Kuantan Singingi	12	198	11	209
8.	Pelalawan	12	93	12	105
9.	Rokan Hulu	16	142	6	148
10.	Rokan Hilir	13	110	7	117
11.	S i a k	14	107	8	115
12.	Kepulauan Meranti	5	68	5	73
	Jumlah	151	1.393	199	1.592

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Riau 2009

F. Tata Ruang Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang saat ini dalam proses penyempurnaan, perwujudan tata ruang wilayah mengindikasikan adanya disparitas perkembangan dan pembangunan antara wilayah Riau bagian utara, tengah dengan selatan; antara kawasan perkotaan dengan perdesaan; dan antara kawasan pantai Timur dengan kawasan Barat. Wujud kesenjangan tata ruang wilayah tersebut antara lain dibentuk oleh sistem pusat-pusat pertumbuhan yang belum berkembang secara hirarkis serta kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah.

Dibutuhkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan secara lebih seimbang dan proporsional yang dalam struktur keruangan terwakili oleh keberadaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta sub-sub PKL yang didukung oleh prasarana transportasi yang berhirarki menurut fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Dalam konteks tersebut kota Pekanbaru tetap berfungsi sebagai PKN sebagai pusat utama untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan kepariwisataan. Kota Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan ibukota kabupaten dapat berperan sebagai pusat-pusat kegiatan dengan fungsi pemerintahan, industri, perdagangan, atau jasa. Kota Dumai yang pada masa mendatang direncanakan berkembang sebagai pusat pengolahan dan distribusi dan koleksi barang dan jasa akan berperan sebagai zona industri Pelintung dan Lubuk Gaung menggantikan fungsi Pulau Batam, pusat pengembangan *biofuel*, dan pusat koleksi produksi hortikultura Sumatera bagian Utara dan Tengah. Fungsi kota Dumai diharapkan berkembang sebagai PKN. Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan ibukota kabupaten lainnya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pengolahan produk primer, pusat distribusi barang dan jasa, dan pusat pemadu moda transportasi.

Pengembangan pusat-pusat kegiatan lokal (kecamatan) dan sub-lokal (pedesaan) dapat berfungsi sebagai agropolitan yang mewadahi kegiatan agroindustri yang mengolah produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kekayaan alam lainnya serta kegiatan agrobisnis yang mendistribusikan dan memasarkan produk pengolahan tersebut. Selain itu, pusat-pusat tersebut dapat berfungsi sebagai obyek dan destinasi pariwisata sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki, didukung oleh prasarana transportasi berupa jalan lokal, angkutan sungai, dan pelabuhan pengumpan sebagai *feeder* terhadap prasarana transportasi kolektor dan arteri

Permasalahan konflik pemanfaatan ruang tercatat di sebagian besar wilayah Provinsi Riau terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang darat dan laut berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga, dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun.

Pada saat ini telah direncanakan dan dirintis pengembangan kawasan industri dengan dukungan pelabuhan laut sebagai akses transportasi, antara lain di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Bengkalis. Sebagai salah satu pembentuk pusat kegiatan, maka pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya. Ada kecenderungan lainnya bahwa perkembangan wilayah yang cenderung berorientasi ke Selat Malaka sebagai akses utama terhadap pusat-pusat regional di Asia Tenggara dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri di kawasan Timur Provinsi Riau.